

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi menggambarkan tujuan, kondisi atau keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, yang berisi suatu gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan, yang dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi, serta digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Visi merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita yang berisikan arahan yang jelas pada masa yang akan datang. Dengan demikian, visi merupakan gambaran masa depan dan perwujudan masa depan yang selama ini belum pernah diwujudkan. Visi yang baik harus dapat memberikan inspirasi dan semangat seluruh sumberdaya yang ada untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, bahwa visi merupakan cita-cita yang sangat menginspirasi dan menantang untuk diraih.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah Kabupaten Parigi Moutong, terlihat bahwa untuk mencapai visi dan misi yang diinginkan, Kabupaten Parigi Moutong memiliki berbagai potensi dan sumberdaya yang dibutuhkan.

Namun demikian, Kabupaten Parigi Moutong juga menghadapi berbagai kendala atau keterbatasan sumberdaya pembangunan lainnya. Oleh karena itu, dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dituntut untuk lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih inovatif, terutama untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi-potensi pembangunan dan juga mengantisipasi kendala-kendala yang ada, serta harus mampu secara efisien dan efektif dalam menghadapi berbagai keterbatasan tersebut. Dengan demikian, keterbatasan dan kendala yang dihadapi akan dapat dikurangi guna dapat memanfaatkan potensi dan peluang pembangunan secara optimal.

Berdasarkan permasalahan dan analisis atas isu-isu strategis pada tingkat global, nasional, regional Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tengah, maupun pada tingkat Kabupaten Parigi Moutong, serta dengan mempertimbangkan arah kebijakan dalam RPJMN, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, maka visi Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 dirumuskan sebagai berikut:

**“MELANJUTKAN TERWUJUDNYA KABUPATEN TERDEPAN
YANG PRODUKTIF, MAJU, AMAN, TERTIB DAN
BERDAYA SAINGTAHUN 2020”**

Visi tersebut adalah suatu gambaran tentang keadaan dan upaya masa mendatang yang berisikan cita-cita luhur yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Kata kunci (*keywords*) yang termuat dalam visi tersebut adalah “melanjutkan, terdepan, produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya saing”. Penjelasan dari kata-kata kunci yang dikandung dalam visi ini dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut.

**Tabel 5.1.
Perumusan Penjelasan Visi**

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
MELANJUTKAN TERWUJUDNYA KABUPATEN TERDEPAN YANG PRODUKTIF, MAJU, AMAN, TERTIB DAN BERDAYA SAING TAHUN 2020	1. Melanjutkan	Pembangunan daerah diarahkan untuk berkesinambungan dan berkelanjutan dengan merujuk pada rencana pembangunan yang telah dicanangkan, dilaksanakan dan dicapai pada masa-masa sebelumnya. Program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan yang sebelumnya, akan dilanjutkan dengan melakukan refungsionalisasi, reaktualisasi, dan redefinisi sesuai dengan kemajuan, tantangan, dan kebutuhan masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya akan dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk lima tahun yang akan datang, sehingga kabupaten Parigi

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
		Moutong menjadi terdepan secara substantif melalui pencapaian pembangunan yang dapat terealisasi dengan lebih cepat.
	2. Terdepan	Terdepan berarti adalah terbaik dalam peningkatan/percepatan pembangunan, jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan kekuatan (<i>strength</i>) yang dimiliki Kabupaten Parigi Moutong, dan meminimalisir keterbatasan dan kelemahan (<i>weakness</i>) yang ada. Untuk menjadi “terdepan” diperlukan usaha keras, upaya sungguh-sungguh dan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, agar pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat baik di pesisir maupun di pedalaman (daratan dan pegunungan). Kondisi pada masa mendatang untuk menjadi “terdepan” sebagai wujud kerja keras masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan Kabupaten Parigi Moutong terbaik di Provinsi Sulawesi Tengah. Secara lebih khusus, Kabupaten Parigi Moutong berupaya untuk menjadi

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
		<p>terdepan yaitu di atas rata-rata provinsi dalam peningkatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pertumbuhan ekonomi • Peningkatan pendapatan per kapita • Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) • Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) • Pengurangan jumlah dan persentase penduduk miskin
	3. Produktif	<p>Yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kerja dan meningkatnya kinerja masyarakat (produktivitas) sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah. Produktivitas dalam pengertian yang lebih luas yakni, masyarakat yang produktif dengan etos kerja yang tinggi.</p>
	4. Maju	<p>Semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya IPM dan berkembangnya infrastruktur (sarana) daerah yang lebih baik dan modern.</p>
	5. Aman	<p>Yang dimaknai dengan</p>

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
		semakin meningkatnya keamanan dan terlaksananya penegakan, serta supremasi hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan dan status sosial seseorang, serta tercapainya penghormatan pada hak hak asasi manusia (HAM).
	6. Tertib	Yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku, baik peraturan hukum nasional maupun peraturan daerah. Tertibnya masyarakat ini menunjukkan kemajuan pembangunan sekaligus persyaratan pembangunan yang bermartabat dan beretika.
	7. Berdaya saing	Yang berarti bahwa Kabupaten Parigi Moutong memiliki kemampuan untuk memanfaatkan keunggulan kompetitif (<i>competitive advantage</i>), sehingga dapat meningkatkan posisi daerah ke urutan (peringkat) yang lebih baik.

5.2. Misi

Misi merupakan upaya yang dilakukan pada masa datang untuk mewujudkan visi. Dengan demikian, misi merupakan penjabaran dari visi. Secara spesifik, misi adalah penetapan tujuan dan sasaran pemerintahan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi-misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good*

- governance*);
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan dan ketakwaan;
 3. Percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan pembangunan dan mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat;
 5. Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah;
 6. Melaksanakan pengelolaan, penataan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Masing-masing misi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

❑ **Misi I: Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*)**

Misi menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten Parigi Moutong, merupakan upaya untuk mewujudkan terlaksananya tata pemerintahan yang baik, yaitu yang dicirikan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk melaksanakan misi tersebut diperlukan langkah-langkah yang terarah dengan melakukan penataan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif.

Tata kelola pemerintahan yang baik telah dirintis dan terus dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, dan akan terus dilanjutkan sebagai upaya untuk mewujudkan tatanan dalam pengelolaan manajemen pemerintahan dan birokrasi pemerintah yang ditujukan untuk menciptakan keterbukaan, akuntabilitas, pelayanan berkualitas, efektivitas dan efisiensi, produktivitas, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat secara luas agar dapat mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan daerah di berbagai bidang.

Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut secara konsisten dan berkelanjutan akan dilaksanakan untuk menyelesaikan berbagai masalah pemerintahan yang timbul atau yang dihadapi secara efisien dan efektif, serta

mendorong terjadinya percepatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari semakin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi. Untuk mewujudkan dan meningkatkan daya saing daerah di segala bidang secara berkelanjutan, maka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat yang mesti dipenuhi. Dalam kerangka inilah maka reformasi birokrasi pemerintah akan dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan komprehensif.

□ **Misi 2: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Keimanan Dan Ketaqwaan (Imtaq);**

Untuk membangun Kabupaten Parigi Moutong menjadi terdepan di Provinsi Sulawesi Tengah, maka tentunya seluruh potensi dan sumber pendapatan, serta sumber daya pembangunan daerah lainnya harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya pembangunan yang berperan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong menempatkan misi pembangunan daerah yaitu peningkatan SDM yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketaqwaan. Langkah tersebut ditujukan bagi peningkatan kompetensi dan keahlian aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat, serta dunia usaha untuk menurunkan jumlah penduduk miskin atau angka kemiskinan, menurunkan jumlah pengangguran dan meningkatnya pembukaan kesempatan kerja atau lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan perkapita dan daya saing daerah, sehingga terwujudnya tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong dapat tercapai.

Kemampuan daerah melalui peningkatan daya saing yang tinggi adalah satu kunci utama bagi tercapainya kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Daya saing yang tinggi, tentu saja akan menjadikan Kabupaten Parigi Moutong siap menghadapi berbagai tantangan globalisasi (antara lain AFTA, APEC) dan mampu memanfaatkan peluang yang ada.

Untuk memperkuat daya saing daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong mengarahkan pembangunan berfokus pada pembangunan SDM, dan aparatur pemerintah yang berkualitas dan yang berdaya saing tinggi. Upaya untuk membangun kualitas manusia baik, sebagai insan

maupun sumber daya pembangunan mencakup seluruh siklus hidup manusia.

Indikator kualitas SDM menjadi makin membaik dari waktu ke waktu antara lain ditandai dengan meningkatnya angka IPM atau *Human Development Index* (HDI) Kabupaten Parigi Moutong dari tahun ketahun.

□ **Misi 3: Percepatan Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;**

Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dan terpenting dari keseluruhan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah, sehingga menjadikan Kabupaten Parigi Moutong sebagai kabupaten terdepan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pola kebijakan dengan mengedepankan Percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (ekonomi masyarakat). Melalui pemanfaatan kemajuan iptek; menciptakan iklim investasi (penanaman modal) yang kondusif; membangun industri dan UMKM hulu-hilir berbasis agribisnis. Selain itu, memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan (*link and match*) dengan sistem produksi, distribusi, dan perdagangan dengan ditopang kualitas pelayanan yang prima dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.

Disisi lain, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program prioritas yang digagas oleh Kabupaten Parigi Moutong yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin setiap tahunnya.

Berbagai program dan kegiatan pengentasan kemiskinan sudah dilakukan untuk mengatasi persoalan sosial ekonomi tersebut, namun harus terus ditingkatkan untuk mengurangi angka kemiskinan secara signifikan dan berdimensi luas dari tahun ketahun. Program pemerintah yang telah dijalankan untuk mengurangi angka kemiskinan, akan terus dioptimalkan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS), distribusi beras rakyat miskin (raskin), dan PNPB dan berbagai program percepatan pengurangan angka kemiskinan akan terus digalakan dan dijalankan secara simultan dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Parigi

Moutong akan dituangkan dalam *blue print* yang disebut dengan GARDA EMAS PARIMO Tahun 2013-2018. Garda Emas Parimo merupakan singkatan dari “Gerakan Terdepan Pembangunan Masyarakat Parigi Moutong” yang memfokuskan pada 4 (empat) program prioritas, yaitu: (1) penanggulangan kemiskinan, (2) penciptaan lapangan kerja, (3) penciptaan daya saing Parigi Moutong, (4) peningkatan pendapatan masyarakat.

□ **Misi 4: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Aspek Pemerataan Pembangunan Dan Mengutamakan Faktor Pengungkit Perekonomian Rakyat;**

Misi ini mengandung makna kesejahteraan yang merata dan berkeadilan, hanya dapat dicapai bila seluruh masyarakat dapat menikmati dan merasakan hasil-hasil pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Olehkarena itu, dengan kewenangan dan sumberdaya yang dimiliki percepatan pembangunan akan didorong dengan memperhatikan aspek pemerataan pada wilayah perkotaan, pesisir, pegunungan, perbatasan serta daerah terisolir dan tertinggal. Untuk menghilangkan kesenjangan pembangunan antar-individu dan antar-wilayah. Misi ini menjadi komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebutuhan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan, sarana pendidikan dan kesehatan di sejumlah wilayah yang sebagian masih dalam kondisi yang cukup memprihatinkan menjadi prioritas, dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran dan asas pemerataan, serta asas proporsional dengan untuk mencapai peningkatan kualitas atau pembangunan.

Indikator kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak lagi didasarkan pada pertumbuhan ekonomian *sich*, tetapi sejauh mana komitmen suatu daerah terhadap usaha menyediakan fasilitas pelayanan dasar secara merata, murah, terjangkau, dan berkelanjutan. Sesuai amanat Undang-undang pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Untuk itu penyelenggaraan pelayanan public (*public services*) termasuk pendidikan dan kesehatan, menjadi komitmen dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan pada masa yang akan datang.

□ **Misi 5:Memantapkan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Guna Memacu Akselerasi Pembangunan Daerah;**

Iklim kehidupan berbangsa dan bernegara yang dinamis, aman, stabil serta damai, selaras dengan capaian pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya secara menyeluruh, adalah satu kesatuan kebutuhan mutlak (*absolute needs*) yang sekaligus merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan daerah.

Pencapaian stabilitas keamanan yang kondusif dan ketertiban masyarakat, tidak terlepas dari peran serta atau partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh sumber daya keamanan bersama masyarakat didalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban, agar pembangunan daerah dapat berjalan baik tanpa ada gangguan yang berarti.

Tingkat kepekaan dan respons untuk meredam secara dini terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban yang muncul, dapat mencegah timbulnya atau terjadinya suatu konflik secara bersama dengan masyarakat, melalui berbagai program pembangunan dalam menjaga, serta memelihara stabilitas keamanan daerah, akan bermuara pada stabilitas keamanan daerah. Sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat terselenggara dengan baik.

Untuk mendorong pelaksanaan penegakan supremasi hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM, pembangunan bidang hukum ditempuh melalui peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang didukung oleh aparatur yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, serta profesional melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel dan disiplin, pencapaian tertib peraturan daerah dengan indikator berkurangnya jumlah peraturan daerah yang bermasalah dan menghambat kemajuan ekonomi, meningkatnya kualitas peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat.

□ **Misi 6:Melaksanakan Pengelolaan, Penataan Dan Pelestarian Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan;**

Misi ini mengandung makna pengelolaan, penataan dan pelestarian SDA secara berkelanjutan dan merupakan upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek pemanfaatan dan pengelolaan SDA sebagai modal pertumbuhan ekonomi,

dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai fungsi penopang pembangunan berkelanjutan dan kehidupan masyarakat.

Misi ini juga memberikan tanggungjawab pengelolaan, penataan, dan pelestarian SDA secara berkelanjutan sebagai tugas bersama antara generasi saat ini dan generasi mendatang. Makna berkelanjutan adalah generasi saat ini tidak meninggalkan kondisi SDA yang memberikan ancaman dan bahaya, serta kerusakan yang akan diterima oleh generasi yang akan datang.

Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian SDA yang memberikan manfaat yang baik untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang sangat diperlukan. Pemerintah daerah melalui kewenangan yang dimilikinya berusaha untuk dapat menyeimbangkan antara pemanfaatan dan pelestarian SDA yang ada di Kabupaten Parigi Moutong.

Tabel 5.2.
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi, Misi dan Penjelasan Misi

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
MELANJUTKAN TERWUJUDNYA KABUPATEN TERDEPAN YANG PRODUKTIF, MAJU, AMAN, TERTIB DAN BERDAYA SAING TAHUN 2020			
1.	-Melanjutkan -Terdepan -Maju	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>good governance</i>)(Misi 1)	<i>Good governance</i> merupakan modal dan fondasi yang kuat dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Olehnya itu guna mencapai <i>good governance</i> , Kabupaten Parigi Moutong akan berupaya untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi serta mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Secara eksplisit, pembangunan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> yaitu: (1) melibatkan partisipasi penuh masyarakat, (2) kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, (3) transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, (4) <i>responsiveness</i> , lembaga – lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders, (5) <i>consensus of orientation</i> yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, (6) <i>equity</i> yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan, (7) <i>efficiency and effectiveness</i> yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) (8) <i>accountability</i> , yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan, (9) <i>strategic vision</i> , yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
		Percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (Misi 3)	Kabupaten Parigi Moutong tercatat sebagai kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Sulawesi Tengah pada tahun 2013. Kondisi ini menjadi <i>motivator</i> bagi pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk melakukan lompatan, terobosan dan program yang inovatif dan integratif agar jumlah penduduk miskin di Kabupaten parigi Moutong dapat dientaskan. Pengentasan kemiskinan ini akan dilakukan dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berdampak pada perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
		Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan pembangunan dan mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat (Misi 4)	Pemerintah berupaya memajukan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan, sarana pendidikan dan kesehatan di sejumlah wilayah yang sebagian masih dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Dengan demikian, aspek pemerataan menjadi prioritas, terutama di daerah pegunungan, pesisir, dan wilayah perbatasan.

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
2.	-Produktif -Berdaya saing	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan dan ketakwaan (Misi 2)	Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sumber daya pembangunan yang berperan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong menempatkan misi pembangunan daerah yaitu peningkatan SDM yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan sebagai misi kedua dalam pembangunan. Untuk membangun kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing, harus didukung dengan pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang baik. Olehnya itu, peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan dan peningkatan perekonomian masyarakat merupakan hal yang diprioritaskan dalam mewujudkan SDM yang produktif dan berdaya saing.
3.	Aman	Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah (Misi 5)	Meningkatkan pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman, pencegahan dan penanganan konflik sosial, pemeliharaan harmoni sosial, penegakan pilar berbangsa dan bernegara, dan penegakan implementasi regulasi daerah. Jika semua kondisi ini dapat diwujudkan, maka akan dapat memacu akselerasi pembangunan daerah.
		Melaksanakan pengelolaan, penataan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkelanjutan (Misi 6)	Misi ini mengandung makna pengelolaan, penataan dan pelestarian SDA secara berkelanjutan dan merupakan upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek pemanfaatan dan pengelolaan SDA sebagai modal pembangunan daerah. Termasuk dalam pengelolaan dan pelestarian SDA ini adalah dengan cara mengurangi tingkat kerusakan hutan, mencegah <i>illegal logging</i> dan <i>illegal fishing</i> , meningkatkan luas kawasan tertutup pepohonan, akses sanitasi layak serta air minum layak.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Parigi Moutong pada masa 5 (lima) tahun mendatang.

Tabel 5.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Parigi Moutong 2013 - 2018

VISI :

**“MELANJUTKAN TERWUJUDNYA KABUPATEN TERDEPAN YANG PRODUKTIF, MAJU, AMAN, TERTIB
DAN BERDAYA SAING TAHUN 2020”**

MISI	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR
<i>MISI 1:</i> Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>good governance</i>)	1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi	1.	Meningkatnya kualitas SDM aparatur mencapai 60%	1. Persentase PNS yang tamat Pendidikan sesuai jenjang Pendidikan 2. Persentase PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural dan fungsional
		2.	Meningkatnya kedisiplinan SDM aparatur hingga mencapai 75%	1. Persentase PNS yang melakukan pelanggaran disiplin 2. Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu
		3.	Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level “memuaskan”	Indeks kepuasan pelayanan publik

	2. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mencapai level “rata-rata baik” untuk seluruh SKPD, dan LAKIP/SAKIP daerah dengan nilai B.	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah
		2.	Mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”	1. Opini hasil pemeriksaan oleh BPK 2. Persentase peningkatan PAD
MISI 2: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ)	1. Meningkatkan derajat pendidikan	1.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72-73	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		2.	Meningkatnya angka melek huruf mencapai 95%-96%	Angka melek huruf
		3.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah mencapai 9-10 tahun	Angka rata-rata sekolah
		4.	Meningkatnya angka partisipasi kasar: APK SD=106-107 APK SMP=77-78 APK SMA=63-64	Angka Partisipasi Kasar (APK)
		5.	Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan	1. Angka pendidikan yang ditamatkan 2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap

				<p>penduduk usia sekolah</p> <p>3. Rasio guru terhadap murid</p> <p>4. Rasio guru terhadap murid per kelas</p> <p>5. Persentase sekolah dalam kondisi baik</p>
		6.	<p>Meningkatnya angka partisipasi murni:</p> <p>APM SD=93-94</p> <p>APM SMP=61-62</p> <p>APM SMA=52-53</p>	<p>Angka Partisipasi Murni (APM)</p>
	2.Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1.	<p>Meningkatnya usia harapan hidup mencapai 67-68 tahun</p>	<p>1. Angka usia harapan hidup</p> <p>2. Rasio posyandu per satuan balita</p> <p>3. Rasio puskesmas, Pustu dan Polindes per satuan penduduk</p> <p>4. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk</p> <p>5. Rasio dokter per satuan penduduk</p>

				6. Rasio tenaga medis per satuan penduduk
		2.	Meningkatnya kelangsungan hidup bayi dan kesehatan ibu	1. Angka kelangsungan hidup bayi 2. Angka Kunjungan Bayi 3. Angka Kematian Ibu
		3.	Menurunnya balita gizi buruk menjadi 1-0%	Persentase balita gizi buruk
	2. Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	1.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan	1. Persentase perempuan yang bekerja dalam: -Lembaga Politik -Lembaga Pemerintah -Lembaga swasta 2. Jumlah KDRT 3. Jumlah pekerja anak dibawah umur 4. Jumlah kekerasan terhadap anak
	3. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja		Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	1. Jumlah lulusan pelatihan 2. Kapasitas pelatihan
	4. Meningkatnya keimanan dan Ketaqwaan	1.	Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama	Rasio tempat ibadah

		2.	Terpeliharanya kerukunan intra dan antar umat beragama	Jumlah dai/mubalig/guru mengaji dan pemuka agama yang mendapatkan bantuan dan pembinaan	
MISI 3: Percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	1. Menurunkan tingkat kemiskinan	1.	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin	
		2.	Menurunnya persentase penduduk miskin menjadi 10-11%	Persentase penduduk miskin	
		3.	Menurunnya indeks kedalaman kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	
		4.	Menurunnya indeks keparahan kemiskinan	Indeks Keparahahan Kemiskinan	
	2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1.	1.	Pertumbuhan ekonomi mencapai 8-9%	1. Pertumbuhan ekonomi
			2.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	2. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara 3. Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB
		3.	1.	Meningkatnya PDRB ADH Konstan menjadi 8-9%	1. PDRB ADH Konstan
			2.	Meningkatnya PDRB per kapita 19 juta – 20 juta	2. Jumlah investasi PDRB per kapita

		4.	Menurunnya tingkat inflasi mencapai 5%-6%	Tingkat Inflasi
		5.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) 2%-3%	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
		6.	Meningkatnya jumlah koperasi aktif, UMKM dan industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Parigi Moutong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase koperasi aktif 2. Jumlah BPR/LKM 3. Persentase UMKM yang dibantu oleh BUMN dan BUMS 4. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHK 5. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri 6. Pertumbuhan industri 7. Cakupan jumlah kelompok pengrajin
<u>MISI 4:</u> Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan pembangunan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar	1.	<p>Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap menjadi 34%-35%</p> <p>Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap menjadi 61%-62%</p>	Panjang jalan dalam kondisi mantap

dan mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat		2.	Meningkatnya proporsi jumlah jembatan kondisi mantap	Jumlah jembatan dalam kondisi mantap
		3.	Meningkatnya jumlah gedung/bangunan milik publik	Jumlah gedung/bangunan milik publik
MISI 5: Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah	1. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	1.	Menurunnya konflik komunal dan konflik SARA	1. Rasio Jumlah Pol-PP per 10.000 Penduduk 2. Rasio Jumlah Pos Siskamling Per 10.000 Penduduk
		2.	Meningkatnya kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP (organisasi kepemudaan)	1. Jumlah LSM 2. Jumlah klub Olahraga/Seni 3. Jumlah gedung Olahraga/Seni 4. Jumlah Organisasi Pemuda 5. Jumlah Organisasi Olahraga/Seni 6. Jumlah Kegiatan Olahraga/Seni
		3.	Menurunnya tingkat kriminalitas	1. Menurunnya angka Kriminalitas 2. Menurunnya angka demo

		4.	Menurunnya tingkat pelanggaran PERDA	Jumlah pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati yang ditertibkan
MISI 6: Melaksanakan pengelolaan, penataan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkelanjutan	1. Memperbaiki pengelolaan dan penataan serta pelestarian sumberdaya alam	1.	Menurunnya tingkat kerusakan hutan (<i>deforestation</i>)	1. Persentase kerusakan hutan 2. Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dilakukan
		3.	Menurunnya kasus <i>illegal fishing</i>	Persentase <i>illegal fishing</i>
		4.	Menurunnya kasus <i>illegal mining</i>	Persentase <i>illegal mining</i>
		5.	Meningkatnya luas kawasan yang tertutup pepohonan	Rasio kawasan tertutup pepohonan
		7.	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas ruang terbuka hijau
		8.	Meningkatnya luas taman kota	Luas taman kota
		9.	Menurunnya kawasan kumuh di daerah pesisir dan pedalaman	Jumlah kawasan kumuh
		10.	Meningkatnya akses air bersih layak	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih layak

		11.	Meningkatnya sanitasi layak	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak
	2. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang lestari dan bijaksana	1. 2.	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan (permukiman)	1. Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya 2. Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan 3. Ketaatan terhadap RTRW 4. Luas wilayah produktif 5. Luas wilayah industri 6. Luas wilayah banjir 7. Luas wilayah kekeringan
	3. Mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana	1.	Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana	1. Persentase Desa yang telah mengikuti kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (KMPB) 2. Presentase aparaturnya yang bersertifikat Pelatihan Tanggap Bencana

5.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018.

Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2013-2018, perlu dirumuskan dan dijabarkan secara operasional melalui program prioritas Pembangunan, sehingga lebih efisien, lebih efektif dan tepat sasaran.

Prioritas pembangunan yang dimaksud bertujuan untuk memenuhi janji-janji politik dan memberi bukti terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta sejumlah tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Parigi Moutong. Prioritas Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong ini disinergikan dan diselaraskan dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Prioritas Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Good Governance dan Reformasi Birokrasi.**
2. **Mewujudkan Kualitas SDM Berdaya Saing;**
3. **Mengentaskan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi;**
4. **Meningkatkan Infrastruktur Dasar Dan Sumber Energi;**
5. **Memantapkan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;**
6. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Berkelanjutan.**

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong diimplementasikan melalui Program Percepatan Pembangunan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Good Governance dan Reformasi Birokrasi.

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
1	Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui reformasi birokrasi	Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah & BKD	Semua SKPD & Kecamatan, Desa/Kel
2	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah melalui pengembangan sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan serta perbaikan	Keuangan Daerah	DPPKAD	Semua SKPD & Kecamatan, Desa/Kel

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
	tatakelola dan pengawasan pemanfaatan asset daerah			
3	Peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui keterbukaan informasi publik	Informasi & Komunikasi	Dishubkominfo	Bappeda, Bagian Humas
4	Peningkatan PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kinerja BUMD Parigi Moutong	Keuangan Daerah	BUMD Parimo & DPPKAD	Semua SKPD & Kecamatan, Desa/Kel
5	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui penyusunan dokumen kebijakan, program dan kegiatan yang sinergis dengan kebijakan Kabupaten Parigi Moutong, nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah	Perencanaan daerah	Bappeda	Sekda, Semua SKPD
6	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah	Perencanaan daerah	Bappeda & BPPMPD	Sekda, Semua SKPD

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
7	Perbaikan insentif bagi unsur pemerintahan desa	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPPMPD	Sekda, Bappeda, Kecamatan, Desa/Kel
8	Penyediaan kendaraan dinas bagi Kepala Desa	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPPMPD	Sekda, Bappeda, Kecamatan, Desa/Kel
9	Bantuan sarana IT untuk meningkatkan kinerja Kepala Desa	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPPMPD	Sekda, Bappeda, Kecamatan, Desa/Kel
10	Memastikan penyelenggaraan pelayanan publik yang murah, sederhana, aman dan ramah berjalan dengan baik; Penegakan disiplin melalui pemberian <i>reward and punishment</i> bagi aparatur	Pemerintahan umum	Sekretariat Daerah & BKD, Satpol PP	Seluruh SKPD, Bappeda, Kecamatan, Desa/Kel
11	Penegakan disiplin melalui pemberian <i>reward and punishment</i> bagi aparatur	Pemerintahan umum,	Satpol PP, Linmas	Sekda, KORPRI, Kecamatan, Desa/Kel
12	Pelayanan satu atap yang cepat, murah, dan aman	Pemerintahan umum	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)	Sekda, Bappeda, Kecamatan, Desa/Kel
13	Melanjutkan perbaikan kesejahteraan aparatur pemerintah melalui Tunjangan Kinerja Daerah	Pemerintahan umum	Sekda dan Badan Kepegawaian Daerah	Seluruh SKPD, KORPRI Kecamatan, Desa/Kel
14	Mendorong dan	Pemerintahan	Sekda dan Badan	Seluruh

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
	mendukung pemberantasan Korupsi	umum	Kepegawaian Daerah	SKPD, Kecamatan, Desa/Kel
15	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui mekanisme perencanaan kolaborasi;	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	BPPMPD, Kecamatan, Desa/Kel
16	Menerapkan Pengawasan, akuntabilitas pemerintah serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian	Inspektorat	Sekda dan Badan Kepegawaian Daerah
17	Melanjutkan penyelenggaraan administrasi dokumen kependudukan secara gratis (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian)	Kependudukan dan Catatan sipil	Dinas kependudukan dan catatan Sipil	Kecamatan, Desa/Kel
18	Meningkatkan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan daerah serta pembangunan Rumah Pintar	Kersipan dan perpustakaan	Badan Perpustakaan, Kearsipan Dan Dokumentasi Daerah	Semua SKPD, Kecamatan, Desa/Kel

2. Mewujudkan Kualitas SDM Berdaya Saing;

A. Bidang Pendidikan

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
1	Memastikan Penyelenggaraan Pendidikan 12 tahun bagi warga usia sekolah tanpa ada pungutan (Gratis).	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Sekda, Bappeda & Kecamatan, Desa/Kel
2	Penyediaan dana tambahan (BOSDA) bagi penyelenggaraan pendidikan gratis, untuk mendampingi biaya operasional sekolah (BOS) yang dirasakan belum cukup untuk penyelenggaraan pendidikan untuk semua secara gratis tanpa ada pungutan.	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Sekda, Bappeda & Kecamatan, Desa/Kel
3	Bantuan biaya pendidikan bagi keluarga miskin untuk meningkatkan akses pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Sekda, Bappeda & Kecamatan, Desa/Kel
4	Meningkatkan akses, pemerataan, dan relevansi pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas serta meningkatkan pendidikan luar sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Sekda, Bappeda & Kecamatan, Desa/Kel
5	Membangun dan menyiapkan, serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan secara merata di seluruh kecamatan khususnya di wilayah terpencil dan wilayah perbatasan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Sekda, Semua SKPD

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
6	Peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan dan pengembangan minat baca masyarakat desa serta pemberantasan buta aksara	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Sekda, Bappeda
7	Penyediaan, pemerataan, dan peningkatan mutu tenaga pendidikan yang meliputi: pemenuhan kebutuhan tenaga pendidikan, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Sekda, Bappeda
8	Peningkatan kesempatan studi lanjut atau mengikuti pendidikan dan latihan bagi tenaga pendidik	Pendidikan	Dinas pendidikan	Sekda, BKD, DPPKAD & Bappeda
9	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik	Pendidikan	Dinas pendidikan	Sekda, BKD, DPPKAD & Bappeda
10	Pembenahan tatakelola penyelenggaraan pendidikan.	Pendidikan	Dinas pendidikan	Sekda, BKD, DPPKAD & Bappeda
11	Pemerataan distribusi tenaga guru	Pendidikan	Dinas pendidikan	Sekda, BKD & Bappeda
12	Menyiapkan anak-anak putus sekolah atau yang tidak mampu melanjutkan untuk kembali ke sekolah atau ditawarkan pendidikan siap kerja, pelatihan; magang, dan praktek kerja.	Pendidikan	Dinas pendidikan	Sekda, Bappeda & Kecamatan, Desa/Kel
13	Peningkatan aktivitas Organisasi kepemudaan dalam mengisi pembangunan	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Sekda, Bappeda & Kecamatan, Desa/Kel
14	Kaum muda diberikan akses pelatihan	Pemuda dan	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan	Sekda, Bappeda &

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
	kewirausahaan. Pendekatan kewirausahaan difokuskan kepada keterampilan praktis dan perencanaan untuk memulai bisnis, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi manajemen usaha, serta memberikan stimulasi keterampilan dan cara-cara berpikir yang berwawasan kewirausahaan.	Olahraga	aan Dan Pariwisata	Kecamatan, Desa/Kel
16	Beasiswa bagi Aparatur berprestasi untuk jenjang S2 dan S3.	Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	Sekda, &Bappeda
17	Meningkatkan Kualitas, mutu dan daya saing aparatur melalui bantuan pendidikan, magang, pelatihan dan penjenjangan yang relevan.	Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	Sekda, &Bappeda
18	Menyediakan dan Memfasilitasi penggunaan internet sebagai sarana pembelajaran dan informasi bagi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong, khususnya pada wilayah kecamatan yang terpencil; terisolir dan wilayah perbatasan.	Komunikasi dan Informasi	Dishubkominfo	Sekda, &Bappeda
19	Beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi untuk melanjutkan studi S1, S2 serta S3;	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Sekda, &Bappeda Kecamatan /kelurahan
20	Meningkatkan daya saing SDM melalui pelatihan	pendidikan	Dinas Pendidikan	

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
	gratis bagi siswa untuk pendidikan komputer dan bahasa inggris			
21	Setiap tahun memberikan beasiswa gratis sekolah tinggi perikanan	Pendidikan	Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pendidikan	Sekda, &Bappeda Kecamatan /kelurahan

2. Bidang Kesehatan

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
1	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar gratis bagi warga miskin	Kesehatan	Dinas kesehatan	Sekda, Dinas Sosial, &Bappeda Kecamatan /kelurahan
2	Penyediaan dan peningkatan biaya operasional pelayanan kesehatan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin	Kesehatan	Dinas kesehatan	Sosial, &Bappeda Kecamatan /kelurahan
3	Penyediaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan diseluruh kecamatan khususnya di daerah terpencil; terisolir dan wilayah perbatasan	Kesehatan	Dinas kesehatan	PU, Sosial, &Bappeda Kecamatan /kelurahan
4	Penyediaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan.	Kesehatan	Dinas kesehatan	SEKDA, BKD & Bappeda

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
5	Pembenahan sistem dan manajemen penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	Kesehatan	Dinas kesehatan	SEKDA, BKD & Bappeda BPP &KB
6	Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat / PHBS.	Kesehatan	Dinas kesehatan	Sosial, BPP &KB &Bappeda Kecamatan /kelurahan
7	Pelayanan Kesehatan yang bermutu, murah dan terjangkau pada rumah sakit.	Kesehatan	Dinas kesehatan	SEKDA, Sosial, &Bappeda Kecamatan /kelurahan
8	Optimalisasi penyelenggaraan desa siaga bagi pelayanan kesehatan yang cepat dan murah.	Kesehatan	Dinas kesehatan	Sosial, &Bappeda Kecamatan /kelurahan
9	Pemerataan distribusi tenaga kesehatan.	Kesehatan	Dinas kesehatan	SEKDA, BKD & Bappeda
10	Penempatan tenaga kesehatan yang lebih merata.	Kesehatan	Dinas kesehatan	SEKDA, BKD & Bappeda
11	Peningkatan status/tipe RSUD Anuntaloko Parigi menjadi rumah sakit rujukan Provinsi Sulawesi Tengah.	Kesehatan	RSUD Anuntaloko	Dinas kesehatan
12	Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Raja Tombolotutu.	Kesehatan	RSUD Raja Tombolotutu	Dinas kesehatan
13	Perbaiki dan pembangunan	Kesehatan	Dinas kesehatan	PU & Bappeda

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
	sarana dan prasarana Puskesmas dan Pustu.			
14	Pembangunan Rumah Sakit Moutong sebagai penyangga pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan Utara.	Kesehatan	Dinas kesehatan	PU, &Bappeda
15	Pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah gratis setiap kecamatan.	Kesehatan	Dinas kesehatan	RSUD, Sosial, &Bappeda Kecamatan /kelurahan
16	Pengadaan rumah sakit lapangan untuk wilayah terisolir, perbatasan, dan rawan bencana.	Kesehatan	Dinas kesehatan	RSUD, Sosial, BPP &KB, &Bappeda Kecamatan /kelurahan
17	Perlindungan perempuan dan anak serta Pengarusutamaan hak perempuan dan anak.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak& keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana	Dinas kesehatan &Bappeda Kecamatan /kelurahan
18	Memerangi gizi buruk bagi anak dalam berbagai bentuk program bantuan dan pencegahan peningkatan gizi buruk.	Kesehatan	Dinas kesehatan	RSUD, Sosial, BPP &KB, &Bappeda Kecamatan /kelurahan
19	Perlindungan bagi ibu hamil dan ibu melahirkan.	Kesehatan& keluarga berencana	Dinas kesehatan	Sosial, BPP &KB, &Bappeda

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
		dan keluarga sejahtera		Kecamatan /kelurahan

• **Bidang Keagamaan**

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
1	Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal di dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan di seluruh sekolah.	Pendidikan	Dinas pendidikan	Bappeda Kecamatan /kelurahan
2	Meningkatkan budaya religuitas (keagamaan) dilingkungan sekolah dan masyarakat desa.	Pendidikan	Dinas pendidikan	Bappeda Kecamatan /kelurahan
3	Peningkatan insentif pembimbing keagamaan (guru mengaji, imam masjid, pendeta, Jero Mangku).	Sosial	Dinas Sosial & BPPMPD	Bappeda Kecamatan /kelurahan
4	Memberikan bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana, prasarana peribadatan, dan kegiatan tempat ibadah.	Sosial	Dinas Sosial & BPPMPD	Bappeda Kecamatan /kelurahan
5	Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa SD/SMP/SMA	Pendidikan	Dinas pendidikan	Bappeda Kecamatan /kelurahan

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
	sederajat guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur menurut keyakinan masing-masing.			
6	Membiayai santri/santriwati untuk mengikuti pendidikan pesantren di Jakarta.	Pendidikan	Dinas pendidikan	Bappeda Kecamatan /kelurahan

Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan,

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
1	Pengentasan Kemiskinan dengan membuka akses pada daerah kantong produksi yang masih terisolir.	Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan Umum	Sosial, BPMPD Bappeda Kecamatan /kelurahan
2	Bantuan Sosial bagi masyarakat rentan.	Sosial	Dinas Sosial	Bappeda Kecamatan /kelurahan
3	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpenci (KAT) dan Penandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	Sosial	Dinas Sosial	Bappeda, BPMPD Kecamatan /kelurahan
4	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.	Sosial	Dinas Sosial	Bappeda, BPMPD Kecamatan

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
				/kelurahan
5	Pengembangan agribisnis pertanian mencakup usaha budidaya dan peningkatan kualitas produksi serta penataan pemasaran hasil (pengelolaan Hulu-Hilir).	Pertanian	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Perindustrian dan Perdagangan
6	Pengembangan usaha perikanan laut dan budidaya hasil laut serta pengembangan sidat dan budidaya perikanan darat.	Kelautan & Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Perindustrian dan Perdagangan
7	Penciptaan lapangan kerja melalui upaya menumbuhkan Investasi Usaha Swasta pada berbagai usaha Komuditi Unggulan daerah.	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,	
8	Peningkatan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan dikalangan generasi muda.	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,	
9	Fasiltasi modal usaha bagi pemuda dan calon tenaga kerja	ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,	
10	Perbaikan, Memangkas peraturan yang menghambat investasi dan melakukan penyederhanaan perizinan.	Penanaman Modal	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)	
11	Melanjutkan	Pertanian dan	Dinas Pertanian	

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, perkebunan dan Perikanan kelautan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Parigi Moutong.	ketahanan pangan; kehutanan, & kelautan Perikanan	dan Peternakan	
12	Mendorong kemandirian peran perempuan dalam peningkatan ekonomi lokal.	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga Berencana	
13	Peningkatan peran partisipatif muda dalam pengentasan kemiskinan dan Pemberdayaan ekonomi lokal.	Koperasi dan UMKM, Pemuda dan Olahraga	Dinas koperasi dan UKM	Badan narkotika kabupaten
14	Membantu usaha masyarakat melalui bantuan permodalan bagi IKM dan UMKM, Petani dan Nelayan.	koperasi dan usaha kecil dan menengah, Industri	Dinas koperasi dan UKM	Dinas perindustrian dan Perdagangan
15	Bantuan Bibit, Pupuk dan alat bagi petani dan nelayan	Pertanian dan ketahanan pangan; kehutanan, & kelautan Perikanan	Dinas pertanian, Dinas kehutanan, Dinas kelautan perikanan	Bappeda
16	Bantuan Modal usaha bagi kelompok usaha masyarakat dan koperasi.	koperasi usaha kecil dan menengah	Dinas koperasi dan UKM	Bappeda
17	Menjaga Stabilitas harga Sembako agar tetap terjangkau oleh masyarakat	Perdagangan	Pendustrian dan perdagangan	Kecamatan /Desa /kel
18	Ketahanan dan	Ketahanan	Kantor Ketahanan	

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
	swasembada pangan lokal.	pangan	Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	
19	Peningkatan Diversifikasi Pangan Masyarakat.	Ketahanan pangan	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	
20	Mendorong Pemberdayaan ekonomi melalui kemandirian pangan masyarakat.	Pertanian dan ketahanan pangan	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	
21	Peningkatan ketersediaan Pangan.	pertanian dan ketahanan pangan	Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	
22	Meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat melalui perlindungan harga komoditi pertanian, perkebunan dan kelautan saat panen.	Pertanian dan ketahanan pangan,	Dinas Perindustrian dan perdagangan,	Dinas Pertanian
23	Menata kawasan pedang (pasar tradisonal) kecamatan dan pasar kaget/tumpah di tingkat desa.	Perdagangan	Dinas perindustrian dan Perdagangan	
24	Pembebasan biaya retribusi bagi pedagang tradisional dan usaha kecil.	Perdagangan	Perdagangan Satpol PP,	Kesbanglin mas
25	Mengendalikan serangan hama/penyakit sejenisnya dan dalam	pertanian dan ketahanan pangan; kehutanan,	Dinas Pertanian	Dinas kehutanan dan perkebuna

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
	peningkatan hasil pertanian, pekebunan dan kelautan.			n

4. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur dasar dan energi.

Dilaksanakan melalui berbagai program Pembangunan Infrastruktur Daerah, sebagai berikut:

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
1	Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan dalam kondisi rusak, baik jalan kabupaten maupun jalan desa berdasarkan kewenangan daerah.	Pekerjaan Umum	Pekerjaan umum	Bappeda
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana terminal, sarana keselamatan lalulintas dan perbaikan manajemen angkutan.	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Ko munikasi Dan Informatika	Bappeda
3	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang murah, aman bagi masyarakat serta sesuai dengan standar pelayanan minimal.	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Ko munikasi Dan Informatika	

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
4	Pengembangan dan subsidi perumahan murah untuk masyarakat dan Pegawai negeri sipil (PNS).	Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum	
5	Melanjutkan Rehabilitasi rumah tidak layak huni (bedah Rumah) dan perbaikan sanitasi bagi penduduk miskin.	Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum	
6	Penyediaan sarana air bersih di seluruh kecamatan melalui sinkronisasi program air bersih provinsi dan nasional.	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	
7	Memfasilitasi penyediaan energi listrik bagi wilayah desa yang memiliki keterbatasan akses terhadap energi.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pekerjaan Umum	
8	Pengembangan sumber energi baru terbarukan.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	
9	Meningkatkan program rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan laut secara terpadu dengan program-program bidang lainnya dan memantapkan rencana pengembangan wilayah.	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	
10	Meningkatkan Sarana Komunikasi pada wilayah terpencil dan	Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan	

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
	terisolir.		Informatika	
11	Memantapkan pelaksanaan dan pengawasan pelanggaran tata ruang wilayah dan tertib administrasi pertanahan.	Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum	
12	Peningkatan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana irigasi dan jalan usaha tani.	Pertanian dan ketahanan pangan	Dinas Pertanian dan peternakan	
13	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian dan kelautan.	Pertanian dan ketahanan pangan; kehutanan, & kelautan Perikanan	Dinas Pertanian dan peternakan	
14	Pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata potensial.	Kebudayaan dan pariwisata	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	
15	Menjadikan Kota Parigi sebagai Kota Adipura.	Pekerjaan Umum Tataruang, Lingkungan hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan hidup	PU, tataruang, Bappeda, Kecamatan Kelurahan
16	Pengelolaan kebersihan dan penataan tataruang kota.	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan hidup	PU, tataruang, Bappeda, Kecamatan Kelurahan

5. Menciptakan keamanan dan perdamaian

Dilaksanakan melalui berbagai upaya menciptakan suasana kondusif terlaksananya pembangunan Daerah, sebagai berikut:

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
1	Mendorong kemandirian	kesatuan	Kesbanglinmas,	

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
	masyarakat dalam menciptakan keamanan, kedamaian di wilayah masing-masing.	bangsa dan politik dalam negeri	Satpol PP	
2	Mencegah konflik antar warga antar desa melalui penyelesaian yang adil.	Pemberdayaan masyarakat desa	BPMPD	
3	Menjaga kehidupan beragama yang rukun, toleran, dan perdamaian.	kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	Kesbanglinmas, Satpol PP	Kecamatan/ kelurahan
4	Harmonisasi hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif.	Pemerintahan umum,	Sekretaris Daerah	Sekretaris Dewan
5	Mengokohkan kualitas demokrasi dengan edukasi politik dan menyertakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik.	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	Kesbanglinmas, Satpol PP	
6	Pemberian kesempatan yang luas pada peran Perempuan dalam pengembangan sosial, politik di Kabupaten Parigi Moutong.	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	
7	Memelihara dan mengembangkan budaya (kearifan lokal) sebagai media pemersatu masyarakat.	Kebudayaan	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Kesbanglinmas, Satpol PP
8	Membina kerukunan hidup intern dan antarumat beragama yang dilakukan melalui kunjungan silaturahmi,	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	Kesbanglinmas, Satpol PP

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
	dialog, dan temu rutin antara pemuda, cendekiawan, pemuka agama, suku dan tokoh umat beragama.			
9	Meningkatkan jaringan kerja sama antar umat beragama dan forum antar suku didalam menjaga perdamaian dan keamanan wilayah Kabupaten Parigi Moutong.	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	Kesbanglinmas, Satpol PP	
10	Penanganan keamanan dan kerawanan pangan.	ketahanan pangan	Badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluh	
11	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui optimalisasi peran polisi pamong praja, satuan linmas dan koordinasi aparat kepolisian.	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	Kesbanglinmas, Satpol PP	Kepolisian

6. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan;

Dilaksanakan melalui berbagai upaya pengelolaan Lingkungan hidup dan Mitigasi Bencana, antara lain sebagai berikut:

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
1	Penegakan peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya pengelolaan hutan lestari dan pemanfaatan sumberdaya hutan	Lingkungan hidup; kehutanan	Badan Lingkungan Hidup	

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
	yang efektif, efisien.			
2	Bantuan Sosial dan reabilitasi korban bencana	Sosial dan kebencanaan	Dinas Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Alam
3	Pengendalian dan pemanfaatan potensi pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan kearifan lokal (<i>local wisdom</i>).	Energi dan sumber daya mineral	Dinas Energi dan sumber daya mineral	
4	Penguatan kapasitas masyarakat dan penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana alam.	Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Alam	
5	Pengembangan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana, rehabilitasi dan pengendalian lingkungan hidup, kawasan pesisir dan laut guna meminimalisir resiko dan perlindungan masyarakat.	Kebencanaan, Lingkungan hidup & Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Alam	Dinas Sosial
6	Peningkatan peranserta dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana bagi pembangunan yang	Lingkungan hidup & Sosial	Badan Lingkungan Hidup	

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
	berkelanjutan.			
7	Melaksanakan pengelolaan, penataan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkelanjutan.	Lingkungan hidup & Sosial	Badan Lingkungan Hidup	
8	Peningkatan penanganan lahan kritis dan pengembangan hutan rakyat.	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
9	Pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat.	Tata ruang dan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Kecamatan dan keluarahan
10	Mengantisipasi bencana alam melalui mitigasi bencana.	kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Alam	
11	Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya alam	Lingkungan hidup dan kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
12	Mengurangi risiko bencana melalui pencegahan <i>illegal logging, Illegal fishing, dan illegal mining.</i>	Kehutanan dan kelautan perikanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
13	Meningkatkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dengan segala dampaknya.	kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Alam	
14	Perbaiki kesetaraan pemanfaatan	Penanaman modal dan	Badan Lingkungan	

No	Program Prioritas Daerah	Bidang Urusan	SKPD	SKPD Pendukung
	sumberdaya alam (SDA) bagi seluruh masyarakat.	lingkungan hidup	Hidup	
15	Perbaikan upaya-upaya pengarusutamaan isu-isu lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.	Lingkungan hidup	Badan Lingkungan Hidup	